

KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PROSES PERADILAN

Oleh : Supriyadi*

A. Pengantar.

Anak merupakan elemen yang mempunyai arti penting bagi suatu negara. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia serta merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa dengan segala ciri dan karakteristiknya yang khas dan khusus. Dalam kedudukan demikian tersebut anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik, mental maupun sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Usaha perlindungan anak tersebut pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat universal serta mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks dan luas. Salah satu ruang lingkup perlindungan anak tersebut menyangkut perlindungan anak yang terlibat dalam persoalan hukum atau perlindungan hukum anak dalam proses peradilan. Usaha perlindungan hukum anak dalam proses peradilan juga telah dilakukan di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Namun demikian, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut ternyata masih mengandung beberapa permasalahan apabila dilihat dari sudut kebijakan legislatif. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa masalah yang masih terkandung dalam kebijakan legislatif mengenai perlindungan hukum anak dalam proses peradilan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

B. Perkembangan Perlindungan Hukum Anak.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa perlindungan anak pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat universal dan mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks dan luas. Perlindungan anak dapat mempunyai arti sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Masalah perlindungan hukum anak telah cukup lama menjadi pusat perhatian dunia internasional, yaitu berawal dari lahirnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 dan kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1958.

Dalam perkembangan selanjutnya telah disahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dituangkan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989, tetapi baru mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak-Hak Anak tersebut merupakan instrumen yang

* S.H., Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM.

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.²

Masalah perlindungan hukum anak ternyata juga mendapatkan perhatian dalam beberapa Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang memfokuskan pada persoalan *Juvenile Delinquency*.³ Dalam Kongres PBB ke-I tahun 1955 di Jenewa, Swiss antara lain dibicarakan tentang "*Prevention of Juvenile Delinquency*". Dalam Kongres ke-II tahun 1960 di London, Inggris antara lain dibicarakan masalah "*New Forms of Juvenile Delinquency*" dan "*Special Police Services for the Prevention of Juvenile Delinquency*". Demikian pula dalam Kongres PBB ke-III tahun 1965 di Stockholm, Swedia juga dibicarakan mengenai *Juvenile Delinquency*.

Pusat perhatian usaha perlindungan hukum anak tersebut dalam perkembangannya telah diarahkan pada masalah *Juvenile Justice* (Peradilan Anak), antara lain pada Kongres PBB ke-VI tahun 1980 di Caracas, Venezuela yang membicarakan tentang "*Juvenile Justice : Before and After the Onset of Delinquency*" dan menghasilkan sebuah Resolusi mengenai "*Development of Minimum Standards of Juvenile Justice*" yang meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi kepentingan dan hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya "*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" atau yang dikenal dengan "*The Beijing Rules*" yang disetujui dalam Kongres PBB ke-VII tahun 1985 di Milan, Italia dan kemudian dikukuhkan dengan Resolusi

Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985.

Demikian pula dalam Kongres PBB ke-IX mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* tahun 1995 di Kairo, Mesir juga diajukan dua "*draft resolution*". Kedua draft resolution tersebut memuat tentang "*Application of United Standards and Norms in Juvenile Justice*" dan "*Elimination of Violence Against Children*".⁴

Perlindungan hukum anak telah dilakukan pula di Indonesia. Usaha perlindungan hukum anak tersebut sebenarnya sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 *juncto* Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita.⁵ Dalam perkembangan selanjutnya lahir berbagai macam peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat ketentuan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, 46 dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295 dan 297 yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, yaitu memperberat ancaman pidana dan menjadikan perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak sebagai suatu tindak pidana.⁶

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 29 dan hlm. 33.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 108-110.

⁴ Perlu dicatat bahwa masih banyak terdapat dokumen/instrumen internasional yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagaimana diinventarisasi dalam Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 155.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

⁶ Pasal 45, 46 dan 47 KUHP tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan sebagainya.

C. Perlindungan Hukum Anak dalam Proses Peradilan.

1. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice Tahun 1985 (The Beijing Rules).

Perkembangan pusat perhatian terhadap perlindungan hukum anak dalam proses peradilan (*Juvenile Justice*) pada dasarnya mulai dibicarakan pada Kongres PBB ke-VI tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender* tahun 1980 di Caracas, Venezuela yang mengambil tema "*Juvenile Justice : Before and After the Onset of Delinquency*" dan kemudian menghasilkan sebuah Resolusi mengenai "*Development of Minimum Standards of Juvenile Justice*" yang meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan anak. Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-VII tahun 1985 di Milan, Italia telah disetujui *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan "*The Beijing Rules*" yang kemudian diterima dan dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 40/33 tanggal 29 November 1985.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* 1985 (selanjutnya disingkat dengan SMR-JJ) digariskan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan seharusnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Salah satu prinsip dasar yang digariskan dalam SMR-JJ tersebut adalah tujuan

atau dasar pemikiran dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rules 5.1 mengenai *Aims of Juvenile Justice*, yaitu bahwa "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence*". (Sistem peradilan anak seyogyanya mengutamakan kesejahteraan anak dan seyogianya menjamin bahwa sanksi apapun terhadap pelaku anak seyogianya selalu dalam keseimbangan antara keadaan pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya).

Selanjutnya dalam *Commentary Rules* 5.1. dijelaskan bahwa Rules 5.1. tersebut menunjukkan dua tujuan atau sasaran yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan anak. Pertama, *the promotion of the well being of the juvenile*. (memajukan kesejahteraan anak) yang merupakan "*the main focus of those legal system in which juvenile offenders*" dan menunjang prinsip "*the avoidance of merely punitive sanctions*". Kedua, *the principle of proportionality* (prinsip proporsionalitas) yang merupakan "*an instrument for curbing punitive sanctions*". Dalam hubungannya dengan hal ini maka reaksi terhadap "*young offenders*" harus didasarkan pada keseimbangan antara "*the gravity of the offence*" dan "*the individual circumstances of offender*".

Prinsip dasar lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan peradilan anak adalah adanya jaminan yang bersifat "*basic procedural safeguards*" yang harus diberikan kepada anak dalam setiap tahap proses peradilan anak. "*Basic procedural safeguards*" tersebut tercantum dalam Rules 7.1. SMR-JJ tentang *Rights of Juvenile*, yaitu meliputi *the presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah), *the right to be notified of the charge*

⁷ Lihat pula dalam "Introduction" dari *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

(hak untuk diberitahukan mengenai tuduhan), *the right to remain silent* (hak untuk tetap diam), *the right to counsel* (hak untuk mendapatkan penasehat-hukum), *the right to the presence of a parent or guardian* (hak atas kehadiran orang tua/wali), *the right to confront and cross-examine witnesses* (hak untuk menghadirkan saksi dan pemeriksaan silang saksi) dan *the right to appeal to a higher authority* (hak untuk meminta banding pada tingkat yang lebih tinggi).

Commentary Rule 7.1. SMR-JJ menjelaskan lebih lanjut bahwa substansi Rule 7.1 tersebut menekankan beberapa aspek penting yang merupakan elemen esensial bagi suatu "*fair and just trial*" yang telah diakui secara internasional. Misalnya asas *presumption of innocence* dapat dijumpai dalam *Article 11 Universal Declaration of Human Rights* dan *Article 14 Paragraph 2 International Convention on Civil and Political Rights*.

Dalam SMR-JJ tersebut juga digariskan mengenai jaminan-jaminan prosedural yang bersifat khusus dalam proses peradilan anak, antara lain dalam hubungannya dengan masalah penyidikan dan penuntutan (*investigation and prosecution*), yaitu Bagian II Rule 10, 11, 12 dan 13 serta pemeriksaan pengadilan dan putusan hakim (*adjudication and disposition*), yaitu Bagian III Rule 14 - 22.

Rule 10 SMR-JJ mengatur tentang *Initial Contact* dalam penyidikan dan penuntutan. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *initial contact* (kontak awal) tersebut adalah:

1. Orang tua atau walinya harus segera diberitahu dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan terhadap anak. (Rule 10.1);
2. Hakim atau lembaga yang berwenang, tanpa menunda-nunda waktu, harus mempertimbangkan masalah pengeluaran

anak tersebut (dari penangkapan atau penahanan). (Rule 10.2);

3. Kontak antara aparat penegak hukum dengan pelaku anak (*juvenile offender*) harus dilakukan dengan cara *respect the legal status of the juvenile* (menghormati kedudukan hukum si anak), *promote the well being of the juvenile* (memajukan kesejahteraan anak) dan *avoid harm to her or him* (menghindari hal-hal yang merusak atau merugikan anak). (Rule 10.3).

Rule 11 SMR-JJ menggariskan suatu pedoman yang dikenal dengan istilah kewenangan "*diversion*" dalam kaitannya dengan penyidikan dan penuntutan. Menurut Rule 11 tersebut, Polisi dan Jaksa diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya.

Dalam praktek kewenangan diversifikasi tersebut biasanya hanya diberikan dan dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak serius, namun *Commentary* Rule 11.2 SMR-JJ menyatakan bahwa "*it need not necessarily be limited to petty cases*" (kewenangan diversifikasi tersebut tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus yang ringan).

Rule 12 SMR-JJ mengatur tentang "*specialization within the police*" yang memandang perlu adanya pendidikan dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah anak. Oleh karena itu Rule 12.1 SMR-JJ menekankan perlunya suatu unit polisi khusus yang terdidik dan terlatih.

Rule 13 SMR-JJ memberikan pedoman mengenai penahanan sementara selama menunggu proses pemeriksaan pengadilan atau

⁸ Lihat selengkapnya dalam Rule 11.1, 11.2, 11.3 dan 11.4 SMR-JJ.

"*detention pending trial*". Dalam kaitannya dengan *detention pending trial* tersebut SMR-JJ menyatakan bahwa *detention pending trial* harus digunakan "*as a measure of last resort and for the shortest possible periode of time*", yaitu sebagai tindakan terakhir dan dilakukan sesingkat mungkin (Rule 13.1), sejauh mungkin diganti dengan "tindakan alternatif" seperti *close supervision, intensive care* atau *placement with a family or in an educational setting or home* (Rule 13.2), memperoleh semua hak dan jaminan menurut *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Rule 13.3), penempatan tahanan secara terpisah dari orang dewasa (Rule 13.4) dan tetap menerima asuhan, perlindungan dan bantuan individual selama dalam tahanan (Rule 13.5).

Menurut *Commentary* Rule 13 SMR-JJ dinyatakan bahwa penekanan terhadap perlunya tindakan-tindakan alternatif tersebut mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan selama anak dalam penahanan sementara, yaitu bahwa "*the danger to juvenile of criminal contamination while in detention pending trial must not be underestimated*".

Selanjutnya beberapa perlindungan yang bersifat khusus dalam hubungannya dengan pemeriksaan pengadilan dan putusan hakim dapat dijumpai dalam Rule 14, 15, 16 dan 17 SMR-JJ. Dalam Rule 14 SMR-JJ diatur tentang "*competent authority to adjudicate*", yaitu bahwa anak harus ditangani oleh "*competent authority*" dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip "*fair and just trial*". Rule 15 SMR-JJ mengatur tentang "*legal counsel, parents and guardians*", yaitu bahwa anak berhak diwakili penasihat hukum dan berhak mendapatkan *free legal aid* selama proses persidangan serta orang tua/wali berhak berpartisipasi dalam proses persidangan dalam bentuk *psychological and emotional assistance*. Selanjutnya dalam Rule 16 SMR-JJ diatur tentang "*social inquiry reports*", yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir pemidanaan, seperti

latar belakang kehidupan anak dan latar belakang dilakukannya tindak pidana.

Rule 17 SMR-JJ menggariskan mengenai "*guiding principles*" yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Rule 17.1 SMR-JJ memberikan pedoman kepada hakim dalam pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. bahwa sanksi yang dijatuhkan harus diseimbangkan dengan *the circumstances and the gravity of the offence, the circumstances and the needs of the juvenile and the needs of the society*;
- b. bahwa penenaan *restrictions on the personal liberty of the juvenile* harus dilakukan dengan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. bahwa penjatuhan *deprivation of personal liberty* tidak boleh dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana yang serius, residivist dan karena tidak ada bentuk sanksi yang tepat;
- d. bahwa penanganan kasus anak harus mempertimbangkan *the well being of the juvenile* sebagai *guiding factor*.

Rule 17.2 SMR-JJ menegaskan agar hakim jangan menjatuhkan pidana mati/*capital punishment*, sedangkan Rule 17.3 SMR-JJ menyatakan agar hakim jangan menjatuhkan pidana badan/*corporal punishment*. Selanjutnya dalam Rule 17.4 SMR-JJ diatur mengenai kewenangan "*diversi*" yang dimiliki oleh hakim, yaitu dapat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan setiap saat ("*the power to discontinue the proceedings at any time*") sebagaimana dimiliki oleh Polisi dan Jaksa (lihat Rule 11.2).

Menurut *Commentary* Rule 17 SMR-JJ bahwa "*the power to discontinue the proceedings at any time is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults*", yaitu suatu karakteristik yang melekat/inheren dalam penanganan pelanggar anak sebagai lawan dari orang dewasa.

2. Convention On The Rights Of The Child Tahun 1989.

Selain beberapa prinsip atau pedoman dalam penyelenggaraan peradilan anak yang digariskan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 (The Beijing Rules)* tersebut di atas, dalam *Convention on the Rights of the Child 1989* juga terdapat beberapa prinsip yang perlu mendapatkan perhatian dalam kaitannya dengan penyelenggaraan peradilan anak, khususnya sebagaimana dinyatakan dalam Artikel 37 dan Artikel 40.

Dalam Artikel 37 *Convention on the Rights of the Child 1989* dinyatakan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Demikian pula pidana mati dan pidana penjara tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;
2. Tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang, dirampas kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemidanaan terhadap anak akan dilakukan sesuai dengan hukum dan hanya dikenakan sebagai tindakan terakhir dan untuk masa yang sesingkat mungkin;
3. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihargai martabatnya sebagai manusia, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik anak dan berhak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya;
4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya

berhak mendapatkan bantuan hukum, berhak melakukan pembelaan atas dasar hukum perampasan kemerdekaannya di muka sidang pengadilan atau terhadap pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapatkan keputusan dengan segera atas tindakan yang dikenakan terhadap si anak.

Selanjutnya dalam Artikel 40 *Convention on the Rights of the Child 1989* dinyatakan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. diakui hak setiap anak yang diduga, dituduh atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum pidana untuk diperlakukan sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya, yang memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia kebebasan orang lain serta mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan reintegrasi anak dan mengembangkan peran konstruktif anak dalam masyarakat;
2. dalam rangka tujuan tersebut, dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dalam berbagai macam instrumen internasional, setiap negara akan menjamin secara khusus agar :
 - a. tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau diputus melakukan pelanggaran hukum pidana atas perbuatan-perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun hukum internasional pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. setiap anak yang dituduh, dituntut atau diputus melakukan pelanggaran hukum pidana setidak-tidaknya mendapatkan jaminan sebagai berikut :
 - 1) dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
 - 2) diberi tahu dengan secepatnya dan secara langsung mengenai tuduhan-

⁹ Lihat pula dalam Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *op.cit.*, hlm. 158-162 serta Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 158-160.

tuduhan terhadap dirinya atau melalui orang tua/walinya serta mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang diperlukan dalam rangka penyiapan dan penyampaian pembelaannya;

- 3) agar perkaranya diputus tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak;
 - 4) tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
 - 5) apabila dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya tersebut dapat ditinjau kembali oleh badan yang lebih tinggi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 6) mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari seorang perjemah apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan;
 - 7) privasi anak mendapatkan penghormatan sepenuhnya pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan badan-badan khusus yang diperuntukkan bagi anak yang dituduh, dituntut atau diputus melakukan pelanggaran hukum pidana, khususnya :
- a. melakukan penetapan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 - b. apabila diperlukan dan dikehendaki, diambil langkah-langkah terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, dengan ketentuan hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak tetap dihormati sepenuhnya;
4. Berbagai macam jenis putusan terhadap anak seperti perintah perawatan, bimbingan, pengawasan, pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya harus

UNIVERSITAS GADJAH MURDA
dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan anak serta pelanggaran yang dilakukan oleh si anak.

D. Beberapa Masalah Dalam Kebijakan Legislatif Mengenai Peradilan Anak.

Pada dasarnya perwujudan perlindungan hukum anak di Indonesia dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu usaha perlindungan hukum anak dalam proses peradilan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut ternyata memakan waktu yang cukup panjang, karena konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Anak sebenarnya telah disiapkan sejak tahun 1967.¹⁰ Meskipun RUU Peradilan Anak telah diundangkan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi berbagai kritik masih dapat dikemukakan terhadap eksistensi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, antara lain menyangkut masalah batas usia pertanggungjawaban pidana anak dan masalah pedoman penjatuan pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut bahkan dikatakan sebagai salah satu fenomena legislatif yang mengandung masalah. Beberapa masalah yang masih terkandung dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut antara lain menyangkut masalah pencabutan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP serta masalah pidana bersyarat dan pidana pengawasan.¹¹

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 128.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 76.

1. Masalah Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibedakan antara batas usia minimal untuk dapat diajukan ke sidang anak dan batas usia minimal untuk dapat dijatuhi pidana/tindakan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, hingga belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹²

Sementara itu batas usia anak untuk dapat dijatuhi pidana/tindakan (dipertanggungjawabkan secara pidana) diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah 12 (dua belas) tahun ke atas, sedangkan usia di bawah 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, dengan ketentuan :

1. apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, hanya dapat dijatuhkan tindakan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu "diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja" (Pasal 26 ayat (3));
2. apabila melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dapat dijatuhkan salah satu tindakan yang diatur dalam Pasal 24 yaitu dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, diserahkan kepada negara dan diserahkan kepada organisasi sosial (Pasal 26 ayat (4)).

Ketentuan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana

diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut ternyata tidak berbeda dengan yang diatur sebelumnya dalam RUU Peradilan Anak.

Batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak 12 (dua belas) tahun tersebut pada dasarnya sudah memadai dan sesuai dengan instrumen hukum internasional, yaitu Rule 4.1 SMR-JJ yang menyarankan agar tidak terlalu rendah dalam menetapkan *the minimum age of criminal responsibility*.¹³

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Konsep KUHP Baru) sendiri juga ditetapkan bahwa batas usia minimal pertanggungjawaban pidana adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun. Dalam Pasal 106 ayat (1) Konsep KUHP Baru dinyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan", sedangkan dalam Pasal 106 ayat (2) Konsep KUHP Baru dikemukakan bahwa "pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana".

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, anak di bawah usia 12 tahun (berarti 8-12 tahun) tetap dapat diproses ke persidangan dan dapat dikenakan tindakan, bahkan dalam hal-hal tertentu anak di bawah usia 8 tahun juga dapat dimungkinkan untuk diproses. Dalam hubungannya dengan hal tersebut pernah dikemukakan sebuah kritik, yaitu "Apakah batas usia 8 tahun itu tidak terlalu rendah. Walaupun tidak dipidana dan hanya dikenakan tindakan, namun apakah pengalaman selama proses diajukan ke persidangan tidak membawa "stigma" dan dampak negatif bagi anak usia rendah?".¹⁴ Oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap

¹² Batas usia minimal anak untuk diajukan ke sidang anak dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut tidak berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 3 RUU Peradilan Anak.

¹³ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 162.

¹⁴ *Ibid.*

kebijakan mengenai batas usia minimal anak untuk dapat diajukan ke sidang anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di muka batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sesuai dengan Konsep KUHP Baru yaitu antara 12-18 tahun. Sementara itu menurut KUHP yang berlaku saat ini, batas maksimalnya adalah "sebelum berumur 16 tahun" (tanpa batas usia minimal). Meskipun KUHP tersebut berasal dari Belanda, ternyata di Belanda sendiri sudah mengalami perubahan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, yaitu antara 12-18 tahun. Ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Bab baru tersebut dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada tahun 1961 berdasarkan Undang-Undang Tanggal 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Tanggal 7 Juli 1994 Stb. 1994 No. 528.¹⁵

Batas usia anak yang dapat diproses ke persidangan diatur dalam Pasal 77a yang menyatakan bahwa "Tidak seorangpun anak dapat dipertanggungjawabkan dalam penuntutan pidana untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebelum usia 12 tahun". Ketentuan Pasal 77a tersebut telah dihapuskan dan ditampung dalam Pasal 486 *Wetboek van Strafvordering* (Sv/KUHAP) yang menyatakan bahwa "Tidak seorangpun dapat dituntut pidana atas suatu perbuatan yang pada saat dimulainya perbuatan, berumur 12 tahun". Sementara itu batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 77a baru yang substansinya diambil dari Pasal 77b lama yaitu "telah berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun

pada saat tindak pidana dilakukan".¹⁶

Dalam KUHP Belanda yang berlaku saat ini terdapat ketentuan yang menarik berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak, yaitu Pasal 77b baru dan Pasal 77c baru. Menurut Pasal 77b baru dinyatakan bahwa "terhadap anak yang telah mencapai usia 16 tahun, tetapi belum 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan (antara 16-18 tahun), hakim tidak dapat menerapkan ketentuan yang berlaku bagi anak (Pasal 77g-77gg) tetapi justru menerapkan ketentuan yang berlaku bagi orang dewasa, berdasarkan alasan kualitas tindak pidana, sifat/karakter pembuat, atau keadaan pada saat tindak pidana dilakukan". Selanjutnya dalam Pasal 77c baru justru dinyatakan bahwa "terhadap anak yang telah mencapai usia 18 tahun, tetapi belum 21 tahun pada saat tindak pidana dilakukan, hakim dapat menerapkan ketentuan yang berlaku untuk anak (Pasal 77g-77gg), berdasarkan alasan sifat/karakter pelaku atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana dilakukan".¹⁷

2. Masalah Pedoman Penjatuhannya Pidana.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Bab III Pasal 22-32 diatur ketentuan mengenai Pidana dan Tindakan. Pencantuman ketentuan semacam ini yang sebenarnya lebih bersifat hukum materiil dapat dipahami mengingat selama ini dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana/tindakan untuk anak, namun demikian seyogianya ketentuan mengenai hal tersebut diintegrasikan ke dalam Konsep KUHP Baru.¹⁸

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa dalam Bab III Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut tidak terdapat dan tidak diatur pedoman mengenai prinsip-prinsip apa yang

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 11-12.

¹⁷ Perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 77b baru tersebut merupakan perubahan redaksi dari ketentuan Pasal 77c lama, sedangkan ketentuan Pasal 77c baru merupakan perubahan redaksi dari ketentuan Pasal 77d lama, tetapi keduanya mempunyai makna dan pengertian yang sama. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 163.

seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/ tindakan) kepada anak, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Eksistensi “pedoman atau prinsip-prinsip penjatuhan pidana” terhadap anak justru sangat penting dikemukakan dalam ketentuan tentang peradilan, mengingat masalah tersebut menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen internasional seperti Rule 17.1, 17.4, 19.1 SMR-JJ, Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113 tentang *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.¹⁹ Oleh karena itu sudah seharusnya pedoman atau prinsip-prinsip tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagai pedoman bagi hakim dan untuk lebih memantapkan usaha perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.

3. Masalah Pencabutan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Dalam Bab VIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Hal tersebut disebabkan karena pengaturan substansi Pasal 45, 46 dan 47 KUHP tersebut sudah dimuat dalam Bab III Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pidana dan Tindakan.

Ketentuan yang terdapat Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut dirasakan janggal karena hanya Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang dinyatakan tidak berlaku, padahal Bab III Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan ketiga pasal tersebut, melainkan juga dengan pasal-pasal lain “tentang pidana” yang tercantum dalam Bab II Buku I KUHP yaitu Pasal 10-43. Apabila penegasan Pasal 67

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dipandang perlu, maka seharusnya juga ada penegasan mengenai tidak berlakunya lagi beberapa pasal dalam Bab II atau bab-bab lain dalam Buku I KUHP.²⁰

4. Masalah Pidana Bersyarat dan Pidana Pengawasan.

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dicantumkan jenis pidana pokok baru berupa “pidana pengawasan” yang lamanya paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Menurut penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam hubungannya dengan hal itu pernah diajukan kritik mengenai keterkaitan antara pidana pengawasan dengan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Terdapat ketidakjelasan antara pidana bersyarat dan pidana pengawasan karena ada kemiripan antara kedua jenis pidana tersebut.²¹ Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam Pasal 29 ayat (7) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar ditepati persyaratan yang telah ditentukan”.

Menurut Konsep KUHP Baru pada hakekatnya pidana pengawasan merupakan pidana yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu ketentuan pidana bersyarat dalam Konsep KUHP Baru ditiadakan.²² Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ternyata tidak ada ketentuan yang

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 163.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 169.

²¹ *Ibid.*, hlm. 166.

²² Lihat dalam Pasal 60 serta Pasal 72 dan Pasal 73 Konsep KUHP Baru.

mengatur mengenai syarat penjatuhannya pidana pengawasan.²³ Hal tersebut berbeda dengan pidana bersyarat yang menentukan syarat penjatuhannya, yaitu apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.²⁴

Tidak adanya ketentuan mengenai syarat penjatuhannya pidana pengawasan tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah. *Pertama*, apakah pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pidana yang diancamkan atau yang dijatuhkan oleh hakim (pidana penjara, kurungan atau denda). *Kedua*, apakah pidana pengawasan dapat dikenakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau hanya untuk tindak pidana tertentu.²⁵

E. Penutup.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat universal serta mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks dan luas. Usaha perlindungan hukum anak tersebut telah dilakukan sejak lahirnya Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak 1924 hingga lahirnya *The Beijing Rules*, kemudian disusul dengan lahirnya *Convention on the Rights of the Child* 1989 dan berbagai dokumen/instrumen internasional lainnya yang mengatur masalah anak.

Salah satu ruang lingkup perlindungan

hukum anak tersebut adalah menyangkut perlindungan hukum anak dalam proses peradilan. Dalam hubungannya dengan hal tersebut terdapat beberapa dokumen/instrumen internasional yang menggariskan prinsip-prinsip dasar dalam rangka penyelenggaraan peradilan anak, antara lain *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* 1985 atau yang dikenal dengan "*The Beijing Rules*" dan *Convention on the Rights of the Child* 1989.

Perlindungan hukum anak dalam proses peradilan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun demikian, apabila dilihat dari sudut kebijakan legislatif ternyata Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut masih mengandung beberapa permasalahan yang justru dapat berpotensi menjadi penghambat dalam penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sendiri. Beberapa masalah yang masih terkandung dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, antara lain menyangkut masalah batas usia pertanggungjawaban pidana anak, masalah pedoman penjatuhannya pidana, masalah pencabutan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP serta masalah pidana bersyarat dan pidana pengawasan. Oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan legislatif mengenai perlindungan hukum anak dalam proses peradilan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

²³ Lihat dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan penjelasannya.

²⁴ Dalam Pasal 72 Konsep KUHP Baru ditentukan bahwa syarat penjatuhannya pidana pengawasan adalah hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *ibid.*, hlm. 167.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 (Konsep KUHP Baru).
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tentang United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, tanggal 29 November 1985.
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 tentang Convention on the Rights of the Child, tanggal 20 November 1989.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

oleh : Djoko Sukisno*

A. Pendahuluan

Konstataasi penganut aliran fenomenologi menegaskan bahwa proses mental seseorang atau masyarakat membentuk realita sosial, bahwa kesadaran seseorang atau masyarakat mewarnai persepsi mereka terhadap realita. Hal tersebut selanjutnya akan dapat menjadikan *explanatory-variable* mengapa konsep pembangunan begitu *multi-interpretable*. Pembangunan sebagaimana realita pada umumnya, menjadi *self-projected reality* yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Pembangunan juga sering kali menjadi semacam *ideology of developmentalism*. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses, yaitu suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

Pembangunan dapat pula diartikan sebagai suatu perkembangan (terjemahan dari *development*), yaitu suatu istilah yang menunjuk pada suatu proses yang sedang berlangsung. Proses tersebut dapat mengarah pada dua keadaan, yaitu pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). Pertumbuhan dan perubahan merupakan dua keadaan yang saling berkait satu dengan lainnya, artinya suatu pertumbuhan dapat diikuti atau didahului oleh terjadinya perubahan dan begitu juga sebaliknya.

Pertumbuhan dan perubahan mengandung proses yang berbeda, pertumbuhan merupakan

perkembangan bersifat kuantitatif. Di dalam pertumbuhan ini terjadi perluasan, peningkatan atau pertambahan jumlah dari sesuatu yang mengalami perkembangan. Sedangkan perubahan merupakan perkembangan bersifat kualitatif, yaitu berkaitan dengan pergantian, pergeseran atau perbauran sesuatu yang lebih substansial seperti sistem nilai yang dianut, pranata-pranata atau norma-norma yang mengaturnya.

Pembangunan hukum sebagai suatu perubahan merupakan suatu perkembangan yang lebih bersifat kualitatif. Perkembangan tersebut meliputi baik sistem nilainya, pranata-pranatanya maupun norma-norma yang dianutnya. Pembangunan hukum sebagai suatu perkembangan yang bersifat kualitatif tidak bisa terlepas dari perkembangan masyarakatnya dimana hukum itu berada.

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional yang di dalam GBHN Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Di dalam GBHN 1999 dijelaskan pula bahwa pembangunan nasional termasuk juga pembangunan hukum harus memperhatikan tantangan perkembangan global.

Keharusan memperhatikan perkembangan global mempunyai arti sangat luas sekali, karena perkembangan global dapatlah diartikan sebagai perkembangan yang ada di seluruh dunia.

* SH., CN. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹ Ideology of developmentalism merupakan kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan-kegagalan yang dialami. Kesadaran tersebut selanjutnya amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan, lihat Moeljarto Tjokrowinoto dalam *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, 2001, hlm. 7.

² J Soedjati Djiwandono, 1991, *Pembangunan Politik, ABRI, dan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik.